

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 34
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (Konsinering)
Dengan	: Pejabat Esselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Jum'at, 11 September 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Hotel Sari Pan Pacifik – Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas Realisasi Anggaran 2015 dan Rencana Kerja serta Pagu Anggaran 2016.</li><li>2. Membahas Kebijakan terkait Prona dan Larasita</li><li>3. Membahas Penanganan Konflik Pertanahan</li><li>4. Membahas terkait Tata Ruang</li><li>5. Membicarakan Percepatan RUU tentang Pertanahan</li></ol>
Ketua Rapat	: <b>Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 32 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada hari Jum'at, 11 September 2015 dibuka pada pukul 14.40 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan tertutup untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan Realisasi Anggaran 2015 dan Rencana Kerja serta Pagu Anggaran 2016, Pembahasan Kebijakan terkait Prona dan Larasita, Pembahasan Kebijakan terkait Prona dan Larasita, Pembahasan terkait Tata Ruang, Pembicaraan Percepatan RUU tentang Pertanahan .
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

## **II. KESIMPULAN**

- A. Terhadap Pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2016 sebesar Rp6,585,290,739, komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat yang akan datang

- B. Terhadap realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN yang baru mencapai 35,75% hingga bulan September 2015, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk lebih meningkatkan kinerja agar tingkat penyerapan anggaran pada sisa waktu di tahun anggaran 2015 dapat lebih dioptimalkan.
- C. Terkait Penyelesaian sengketa, kasus dan perkara pertanahan pada tahun 2015 yang hanya dapat menyelesaikan 261 kasus dari jumlah kasus sebanyak 4.199. Berdasarkan data tersebut, Komisi II DPR RI meminta kementerian ATR/BPN agar memberikan prioritas kegiatan terhadap penyelesaian sengketa pertanahan.
- D. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI agar memberikan perhatian khusus pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN RI yang tingkat penyerapan anggarannya masih sangat rendah.
- E. Konsiyering Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN pada hari ini akan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat pada waktu yang akan datang.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

**Jakarta, 11 September 2015**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA**  
**A-345**